

EKSISTENSI KAUM BANGSAWAN DALAM BIROKRASI DI KABUPATEN BONE

Andi St. Aisyah
Jurusan Sosiologi Antropologi, Program Studi Pendidikan Antropologi,
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar
Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan
andiaisyah74@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) bangsawan dapat dibedakan dengan masyarakat lainnya dengan melihat penyematan gelar *Andi* didepan namanya, namun bukan hanya itu saja. Bangsawan juga memiliki empat sifat yang harus dimiliki dalam diri bangsawan yaitu *Lempu*, *Getteng*, dan *Temmapasilaingeng*. Selain itu, bangsawan juga memiliki sifat yang lemah lembut dan menghargai orang lain; (2) kaum bangsawan masih ingin mempertahankan dan melanjutkan legitimasi kepemimpinan di Kabupaten Bone yang diwariskan oleh raja-raja Bone terdahulu, karena ruang demokratis masyarakat sudah luas bagi siapapun yang berkompeten dan berkemampuan mampu untuk menjabat kedudukan di tataran birokrasi Kabupaten Bone, timbul kepercayaan di kalangan masyarakat bahwa pemimpin di Bone harus berasal dari keturunan bangsawan atau keturunan raja-raja terdahulu untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat; (3) kondisi birokrasi ditinjau dari hubungan kerabat “masih sangat kental”. Hal ini dikarenakan kondisi birokrasi masih diisi dengan sederet nama bangsawan, namun bangsawan ataupun orang-orang yang terlibat dalam hal perekrutan birokrasi tidaklah dilakukan hanya dengan melihat status kerabatnya melainkan dipilih lewat proses perekrutan yang mengedepankan nilai kemampuan dan kapabilitasnya menjadi calon pejabat di birokrasi Kabupaten Bone; (4) Hadir dan mendominasinya bangsawan dalam birokrasi di kabupaten Bone, serta mampu tercipta eksistensi bangsawan dalam birokrasi Kabupaten Bone ternyata disebabkan oleh strategi bangsawan itu sendiri, kesadaran kaum bangsawan yang menyadari bahwa dirinya memiliki garis keturunan dari pemimpin yang terhormat dan disegani sehingga termotivasi untuk mengikuti jejak langkahnya. Dengan menganut pula prinsip kebangsawanan leluhurnya dijadikan pedoman dalam hidupnya sehingga kehormatan dan mampu disegani sebagai kaum bangsawan tetap dimilikinya.

Kata Kunci: Eksistensi, Bangsawan, Birokrasi.

A. Latar Belakang

Secara politis, Indonesia adalah sebuah Negara. Di sisi lain, secara antropologis Indonesia juga merupakan sebuah bangsa. Sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki struktur pemerintahan yang tentu saja bertujuan untuk mengatur atau menguasai. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia memiliki kultur yang beragam, sebagaimana

kultur/budaya adalah sebuah cara hidup manusia. Sama halnya dengan apa yang terjadi di tataran daerah yang ada di Indonesia khususnya Kabupaten Bone sebagai sebuah daerah yang lekat dengan kultur/budayanya yang ada hingga saat ini.

Kekuasaan pusat pada Kerajaan Bone secara historis dan budaya tergantung pada mitos raja *To Manurung* sebagai legitimasi

atas kekuasaannya. Raja dan pengganti-penggantinya semuanya mengacu pada mitos tersebut. Meskipun diakui bahwa alam demokrasi telah hidup pada masa lalu dikerajaan ini, namun patut dicatat bahwa seluruh raja yang berkuasa dikerajaan ini memiliki hubungan darah dengan raja pertama sebagaimana yang dikatakan dalam buku sejarah Bone.

Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan sistem pemerintahan yang tadinya sudah menjadi penerimaan umum di Kerajaan Bone bahwa raja pertama di kerajaan ini adalah *To Manurung* atau yang turun dari langit serta raja penggantinya dipercaya sebagai keturunan langsung dari raja pertama yang bergelar *Arung Pone* (raja dipusat Bone) atau *Petta MangkauE* (raja yang berkuasa dan duduk di atas tahta kerajan), dan proses pengangkatan raja diangkat atas dasar musyawarah dan mufakat oleh Dewan adat sesuai dengan aristokrasi atau demokrasi. Namun setelah Pemerintah Hindia Belanda menguasai kerajan ini, raja diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda sesuai perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1860¹.

Fenomena dinasti politik dalam ranah lokal muncul seiring dengan diberlakukannya Pemilu pertama kali di Indonesia pada tahun 2005 maupun implementasi otonomi daerah tahun 2001. Seiring dengan berjalannya kedua proses tersebut sebagai wujud demokratisasi di aras lokal, berbagai elit bermunculan di daerah untuk mengkooptasi kedua proses tersebut. Kemunculan para elit dalam demokrasi lokal tersebut lazim dikenal dalam istilah reorganisasi kekuasaan. Reorganisasi ini diartikan sebagai kembalinya pengaruh kekuasaan politik elit lokal ke dalam era demokrasi.

Dalam hal ini sistem politik pemerintahan di daerah terkesan dinasti politik, yang merupakan cerminan bentuk politik kekuasaan pada masa lampau, seperti

yang diuraikan penulis sebelumnya bahwa di Kerajaan Bone seluruh raja yang berkuasa memiliki hubungan darah dengan raja yang pertama sehingga saat ini hubungan darah bangsawan masih menjadi wacana dalam kontestasi politik di Kabupaten Bone.

Hal ini menarik minat dan rasa keingintahuan saya, untuk meneliti bagaimana hal ini bisa terjadi. Bagaimana bangsawan masih terus mendominasi birokrasi di Kabupaten Bone mengingat zaman kerajaan telah lama beralih ke sistem pemerintahan dan tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan selain itu, pendidikan pada masa sekarang ini, sudah bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa orang yang notabene bukan bangsawan atau non-bangsawan bisa memiliki pendidikan yang sama sehingga juga mampu memiliki kecerdasan dan kemampuan yang sama dalam hal memegang jabatan pemerintahan. Artinya kesempatan antara seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi pemimpin daerah adalah sama.

Penelitian ini tidak bermaksud untuk membeberkan secara panjang lebar dan mendalam seluruh proses sejarah perkembangan sistem politik di Kabupaten Bone, tetapi lebih membatasi diri pada salah satu aspek sistem politiknya, yaitu mengenai golongan elite kaum Bangsawan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik seorang masyarakat digolongkan bangsawan ?
2. Mengapa kaum bangsawan melibatkan diri dalam birokrasi di Kabupaten Bone?
3. Bagaimana kondisi birokrasi di Kabupaten Bone ditinjau dari hubungan kerabat
4. Bagaimana strategi eksistensi kaum bangsawan dalam kehidupan birokrasi pada pemerintahan Kabupaten Bone ?

¹ Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Bone
"Sejarah Bone", hal 236

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi informan orang yang bekerja di tataran birokrasi di Kabupaten Bone, Tokoh masyarakat yang merupakan orang-orang yang di tuakan atau dihormati dan masyarakat yang terlibat dalam suatu birokrasi di kabupaten Bone. *Key person* atau orang kunci dalam penelitian ini adalah bangsawan yang tergabung dalam birokrasi.

Pembahasan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak 174 km dari Kota Makassar. Bone merupakan kabupaten terluas ketiga yang ada di provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah kecamatan sebanyak 27 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Bone adalah 4.559 km dengan luas wilayah terluas ada di Kecamatan Bontocani dan luas wilayah terkecil berada di Kecamatan Tanete Riattang Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kabupaten Bone terdiri dari:

0 m - 100 m = 39,88 %

101 m - 500 m = 45,09 %

501 m - 1000 m = 12,70 %

1.001 m keatas = 2,34 %

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 79% - 88% dengan temperatur berkisar 25,10C – 27,60C.² Dengan rincian lahan, Persawahan 88.449 Ha, Tegalan/Ladang 120.524 Ha, Tambak/Empang 11.148 Ha, perkebunan

negara/swasta 43.052,97 Ha, Rutan 145.073 Ha, Padang rumput dan lainnya 10.503,48 Ha. Jumlah penduduk 655.091 jiwa terdiri dari : pria 308.433 jiwa dan wanita 346.658 jiwa dengan kepadatan rata-rata 140 jiwa/km². Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95% - 99% dengan temperatur berkisar 26C – 34C. Pada periode April – September, bertiup angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada bulan Oktober-Maret bertiup Angin Barat, saat dimana mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone. Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu:

Kecamatan Bontocani dan kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi wilayah timur. Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah Bone bervariasi, yaitu: rata-rata < 1.750 mm; 1750 – 2000 mm; 2000 – 2500 mm dan 2500 – 3000 mm. Pada wilayah Kabupaten Bone terdapat juga pengunungan dan pembuktian yang dari celah-celah terdapat aliran sungai. Disekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam. Kondisi sebagai yang berair pada musim hujan kurang lebih 90 buah. Namun pada musim kemarau sebagian mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar, seperti sungai walenae, Cenrana, Palakka, Jaling, Bulubulu, Salomekko, Tobunne dan Sebagai Lekoballo.³

2. Bangsawan di Kabupaten Bone Beserta Karakteristiknya

Kasta berasal dari bahasa Portugis *casta* yang berarti pembagian masyarakat. Kasta yang sebenarnya merupakan perkumpulan tukang-tukang atau orang-orang ahli dalam bidang tertentu. Seperti

²Bone Dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone

³Data Bapedda dan Statistik Kab. Bone 2010

halnya kasta-kasta di Kabupaten Bone merupakan hasil penyusunan yang menjadi ketentuan atau pengaturan (Wari) yang telah ditetapkan raja Bone dimasa pemerintahan *Lapatau Matanna Tikka Martinroe ri Nagauleng* (Raja Bone ke-16) sekitar tahun 1696-1714 M. sejak itulah susunan dan tingkatan derajat bangsawan di Bone diberlakukan bahkan masih ada sampai sekarang.

Pembagaian kasta ini merupakan faktor penting yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan religious dari masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Di dalam buku *Latoa* (kumpulan dari sabda-sabda dan petuah-petuah dari raja-raja dan orang-orang cerdik pandai dahulu kala) dikatakan, bahwa memelihara dan mempertahankan kasta-kasta adalah salah satu syarat untuk menjadikan sebuah negeri menjadi besar. Dikatakan selanjutnya bahwa kemakmuran sebuah negeri adalah bergantung dari empat perkara, yang mana setelah agama islam masuk ke Bone ini ditambahkan dengan apa yang disebut *sara*. Dalam kehidupan kebudayaan, geliat dan gairahnya tumbuh dalam berbagai bentuk.⁴

Adapun beberapa Kasta-kasta yang terdapat di Kabupaten Bone dapat diperinci atas tiga kasta utama, yaitu :

- a. Anak Arung (anak raja-raja)
- b. To-Maradeka (orang-orang merdeka/orang-orang biasa atau kebanyakan)
- c. Ata (hamba-sahaya atau budak)

Kasta Arung terbagi dalam golongan-golongan, yaitu :

- a. Anak Arung Matasa' (anak raja/putera-puteri mahkota yang masak/murni darahnya), yaitu ayah dan ibunya anak arung matasa', baik yang berketurunan dari kerajaan Bone sendiri maupun yang berketurunan dari

kerajaan-kerajaan lain yang dinilai sederajat/setinggi dengan Bone, antara lain : Luwu, Gowa, Wajo, Soppeng dan Sidenreng. (golongan ini disebut ana'-Pattola, yang berhak penuh menggantikan raja.

- b. Arileng atau Anak Manrapi, yaitu anak yang lahir dari : Bapak, dari kasta golongan Anak Arung Matasa. Ibu, dari kasta golongan yang tingkatnya atau darahnya menurun (tidak sama dengan suaminya), yang biasa disebut Rajeng. Golongan ini dapat diangkat menjadi raja bilamana tidak ada Anak-Pattola, karena Anak-Pattola dianggap tidak cakap untuk menduduki tahta kerajaan).
- c. Rajeng, yaitu anak lahir dari : Bapak, dari Kasta golongan anak arung Matasa atau anak Manrapi. Ibu dari kasta/golongan yang tingkatnya/derajatnya menurun (jauh beda dengan suaminya, yang lazim disebut Cera-Ciceng atau anak arung sipu-E (bangsawan separuh, anak cera', bangsawan campuran).
- d. Anak Arung SipuE (bangsawan Separuh), yaitu anak yang lahir dari : Bapak kasta golongan anak Arung Matasa atau anak Manrapi. Ibu dari kasta golongan To-Maradeka (orang yang merdeka/orang biasa atau kebanyakan).
- e. Anak Ce-ra' (bangsawan campuran), yaitu anak yang lahir dari : Bapak dari kasta golongan anak arung SipuE. Ibu dari kasta golongan To-Maradeka (orang merdeka/orang biasa /kebanyakan ataupun budak).

Kasta To-Maradeka terbagi dalam golongan :

- 1) To-Deceng (orang baik-baik).
- 2) To-Sama'/To-Maradeka (biasa atau

⁴Ilham daeng Makkelo.2017.*Penataan kota dan masyarakat perkotaan Makassar sebagai ibukota negara Indonesia timur (NIT) 1946-1950*.Gadjah Mada Journal of Humanities, Vol.2, No.1

kebanyakan/orang-orang yang merdeka)

Kasta Ata terbagi dalam golongan :

- 1) Ata-mana (hamba sahaya warisan)
- 2) Ata-mabuang (hamba sahaya baru)

Berdasarkan jawaban dari salah seorang informan saya mengatakan bahwa: “idi sebagai Arung’e ndi bukan cuma *asetta nita tau’we* tapi haruski punya sifat-sifat *akkarungeng*. Dimana haruski menjunjung tinggi yang namanya *lempu*, *getteng*, *ada tongeng* dan *temmapasilaingang*.”⁵ Dari data tersebut menyebutkan bahwa jika hanya bermodalkan nama bangsawan itu saja tidak cukup untuk menunjang kebangsawanan itu sendiri. Tapi ada sifat-sifat yang juga harus dimiliki dalam diri seorang bangsawan/raja/pemimpin.

Dalam Kehadiran *To Manurung* sebagai sosok dengan berbagai kelebihan, pada saat itu pula muncul bertepatan pada saat titik klimaks setiap kelompok yang bertikai untuk berhenti saling bertempur. Kehadiran *To Manurung* yang dikisahkan dengan begitu dramatis dalam *lontara*.⁶ Dan terbentuknya pelapisan sosial di Kabupaten Bone akhirnya dikenal dengan sebutan Bangsawan. Dimana bangsawan memiliki hal yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Berdasarkan data yang didapatkan bahwa bangsawan dapat dibedakan dengan masyarakat lainnya dengan melihat penyematan gelar *Andi* di depan namanya, namun bukan hanya itu saja. Bangsawan juga memiliki empat sifat yang harus dimiliki dalam diri bangsawan yaitu *lempu*, *getteng*, *ada tongeng* dan

temmapasilaingang serta sifat lemah lembut dan sopan yang dimiliki oleh seorang bangsawan.

3. Keterlibatan Bangsawan dalam Birokrasi di Kabupaten Bone

Bangsawan di Kabupaten Bone juga sangat dikenal dengan keterlibatannya di dalam birokrasi di Kabupaten Bone. Tak jarang kita mendengar atau menjumpai poster maupun mendengar nama-nama yang terjun ke dunia politik atau bekerja di birokrasi Kabupaten Bone berasal dari kalangan kaum bangsawan. Hal ini sudah tergambar dengan jelas dari beberapa dekade sebelumnya dan masih bertahan hingga saat ini.

berdasarkan dari penelitian saya dilapangan menghasilkan bahwa keterlibatan kaum bangsawan dalam birokrasi di Kabupaten Bone memiliki beberapa alasan. Alasan tersebut diantaranya:

a. Sadar akan asal-usulnya

Kaum bangsawan melibatkan dirinya dalam birokrasi di Kabupaten Bone dikarenakan kaum bangsawan yang ada sekarang ini di Kabupaten Bone menyadari betul asal-usulnya dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budayanya. Kaum bangsawan berasal dari keturunan raja-raja Bone terdahulu. Dengan kata lain, kaum bangsawan di Bone merupakan keturunan pemimpin-pemimpin di Bone pada zamannya. Dan sebagai bentuk penghargaan serta kesyukuran atas warisan mulia dari leluhurnya hingga mereka dijuluki bangsawan di Bone akhirnya terlecut hatinya untuk mempertahankan nilai-nilai kebangsawanan tersebut. Sehingga di Bone dikenal dengan istilah *abbatireng* atau *ajjuareng* atau *wija To-Mapparenta*, yang artinya dapat saya artikan atau makna sebagai kesadaran penuh akan apa yang ada didiri seorang bangsawan yakni didirinya terpatri atau mengalir darah dari seorang pemimpin yang sangat dihormati dan

⁵Wawancara dengan bapak PR, tanggal 5 Maret 2019

⁶Mattulada. 1995. *Latoa Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik OrangBugis*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.

disegani. Atau singkatnya, keturunan dari darah seorang pemimpin.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan saya, yaitu :

“kita yang dianugerahkan gelar Bangsawan dari leluhur kenapa kemudian kita mau masuk di dunia birokrasi di Kabupaten Bone, itu karena ada yang disebut dengan *abbatireng/ajjuareng/wija To-Mapparenta*. Dimana sejak kita lahir sudah ada ditanamkan nilai-nilai kepemimpinan karena nenekta atau kakekta itu adalah pemimpin terdahulu atau raja di Kabupaten Bone. Kita sebagai *wijanna* atau keturunannya itu yang menjadi motivasi positif juga untuk kita supaya melanjutkan kepemimpinan itu”.⁷

- b. Kepercayaan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya serta sejarah Kabupaten Bone

Bukan hanya bangsawan itu saja yang menganggap harus melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan namun sebagian masyarakat yang masih memiliki pemikiran lokal pun menjadikan keturunan merupakan salah satu syarat dalam menilai dan menentukan sebuah pemimpin atau yang terlibat dalam struktur birokrasi di Kabupaten Bone. Dengan kata lain, masyarakat melihat terlebih dahulu apakah orang tersebut benar-benar bangsawan yang mempunyai garis keturunan pemimpin atau tidak. Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan saya yaitu:

“sekarang memang sudah bisa semua orang mencalonkan jadi kepala desa ndi, tapi saya pribadi tetap ka percaya sama Arung artinya kalau masih ada Arung yang bisa memimpin kenapa tidak. Contohmi di desa ini ndi, yang kepala desa ini sekarang cucunya dari kepala desa sebelumnya dan Alhamdulillah masih aman dirasa

desa dan tidak adaji masalah apa-apa.”⁸

- c. Ruang demokratis terbuka Luas

setiap masyarakat yang memiliki kapabilitas dan ingin berpartisipasi dalam birokrasi di Kabupaten Bone tidaklah ada batasan baik dari kalangan bangsawan maupun non bangsawan. Hal inipun kemudian dibenarkan oleh salah satu informan saya juga mengatakan bahwa:

“Sekarang itu sudah demokratis ndi, siapapun yang mau masuk menjadi pejabat di birokrasi Kabupaten Bone bisa saja. Yang penting dia memiliki kapabilitas yang cukup, baik itu dari bangsawan ataupun bukan dari golongan bangsawan. Terserah masyarakat saja yang mau dan mampu”.⁹

Dari data diatas menyebutkan bahwa sebenarnya siapapun yang ingin melibatkan dirinya dalam sebuah tatanan birokrasi di Kabupaten Bone tidaklah ada batasan baik dia berasal dari golongan bangsawan maupun bukan dari golongan bangsawan selama memiliki kemauan dan kemampuan yang mumpuni. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan keterlibatan bangsawan dalam birokrasi di Kabupaten Bone.

4. Kondisi Birokrasi Kabupaten Bone ditinjau dari hubungan kerabat

Melihat kondisi birokrasi di Kabupaten Bone saat ini ditinjau dari hubungan kerabat berdasarkan hasil penelitian saya mengatakan “masih sangat kental”. Artinya, birokrasi di Kabupaten Bone berdasarkan data dan hasil pengamatan selama penelitian lapangan membuktikan bahwa birokrasi diisi oleh sebagian besar kaum bangsawan dan memiliki kekerabatan antara pejabat yang satu dengan pejabat yang lainnya atau masih dari keturunan raja-raja Bone atau bangsawan Bone terdahulu.

⁸ Wawancara dengan HN, Tanggal 05 Maret 2019

⁹Wawancara dengan bapak AI, tanggal 6 Maret 2019

⁷Wawancara dengan bapak PR, tanggal 5 Maret 2019

Namun hasil penelitian saya membenarkan pula bahwa dalam proses perekrutan tidak serta merta hanya berdasarkan kekerabatan melainkan karena kemampuan pejabat birokrasi itu sendiri. Hal ini diutarakan oleh beberapa informan saya pada saat wawancara dan mengatakan bahwa:

“saya ini direkrut menjadi pejabat yang bekerja di kantor Bupati ini atau birokrasi ini itu tidak langsung ndi, meskipun saya juga bangsawan tapi samaji dengan pegawai lainnya yang bukan bangsawan harus dulu melalui prosedural-prosedural yang ada dan sesuai aturan berlaku dan harus memenuhi syarat. Kalau dibilang karena hubungan kekerabatan itu penilaian terakhir bahkan tidak bisa sebenarnya masuk penilaian”.¹⁰

Dari data diatas mengatakan bahwa proses perekrutan pejabat di birokrasi kabupaten Bone tidaklah serta merta, namun harus melalui proses-proses pemilahan lewat syarat yang ada dan siapapun itu harus melalui dan menaati syarat serta ketentuan yang ada. Sehingga penilaian kekerabatan itu bukanlah menjadi faktor yang sangat mendukung sehingga dapat direkrut namun tidak terlepas dari kemampuannya sendiri. Oleh karena itu, penilaian kekerabatan juga dapat dikatakan tidak terlalu berpengaruh. Hal ini dibuktikan bahwa masih adanya pejabat birokrasi yang bukan dari golongan kaum bangsawan. Mereka diberi jabatan birokrasi berdasarkan kualifikasi atau kemampuan mereka sendiri. Maka, jika hingga hari ini tatanan birokrasi di Kabupaten Bone masih didominasi oleh bangsawan itu disebabkan oleh kemampuan dalam diri bangsawan itu sendiri.

Kesimpulannya ialah kondisi birokrasi ditinjau dari hubungan kerabat pada dasarnya masih sangat kental dibuktikan dengan kondisi birokrasi yang diisi oleh sederet nama bangsawan, namun bangsawan

ataupun orang-orang yang terlibat dalam hal perekrutan birokrasi tidaklah dilakukan hanya dengan melihat status kerabatnya melainkan dipilih lewat proses perekrutan yang mengedepankan nilai kemampuan dan kapabilitasnya menjadi calon pejabat di birokrasi Kabupaten Bone.

5. Strategi Eksistensi Kaum Bangsawan dalam Pucuk Birokrasi di Kabupaten Bone

Terkait eksistensi kaum bangsawan dalam kehidupan birokrasi di Kabupaten Bone memang menyisakan tanda tanya yang besar. Mengapa hal ini bisa terjadi dan berlangsung terus-menerus. Maka dari itu peneliti dalam hal ini fokus pada pencarian informasi mengenai strategi-strategi kaum bangsawan dalam mempertahankan eksistensi di kehidupan Birokrasi pemerintahan Kabupaten Bone. Dari hasil wawancara dari beberapa informan, peneliti menemukan informasi yang dicari yakni:

- a. warisan dari strategi pemerintahan pada masa kerajaan.

Pada masa kerajaan, kerajaan Bone terbagi beberapa distrik yang sekarang dikenal dengan nama kecamatan. Dahulu untuk menciptakan suasana kerajaan yang kondusif, raja Bone mengangkat kepala distrik dari kerabat raja itu sendiri. Tujuannya untuk meminimalisir pemberontakan atau apapun itu dalam hal melawan pemerintahan. Sehingga pemimpin-pemimpin distrik merupakan pemimpin-pemimpin yang dipercaya oleh raja dan masih merupakan kerabat raja. Dan dalam pelaksanaan tugas, pemimpin distrik ternyata mampu mengemban tugas dengan baik sehingga dihormati dan disegani rakyatnya. Pemimpin distrik mampu mengatasi permasalahan-permasalahan rakyat di wilayah ditempatkannya. Akhirnya pemimpin distrik itulah yang kemudian diteruskan kepemimpinannya oleh anak cucunya atau garis keturunannya yang dianggap mampu mengemban tugas kepemimpinan selanjutnya. Itulah yang menjadi awal mengapa di tiap desa hingga

¹⁰Wawancara dengan bapak AR, tanggal 7 Maret 2019

kecamatan dipimpin oleh kaum bangsawan. Setelah beralih dari kerajaan ke pemerintahan daerah. Awal dari pemerintahan, bukan pemilihan langsung kepala daerah melainkan penunjukan langsung oleh pemerintah. Maka dari itu, ditunjuklah keturunan bangsawan yang telah terbukti mampu memimpin wilayahnya dengan baik.

- b. Alasan kedua yaitu kesadaran kaum bangsawan di Kabupaten Bone

Bangsawan di Kabupaten Bone saat ini sadar betul akan asal-usulnya serta selalu ditanamkan dalam dirinya oleh orangtuanya untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya serta menghormati sejarah-sejarah Kabupaten Bone. Kesadaran kaum bangsawan mengingatkan dirinya akan kehebatan warisan dari leluhurnya sehingga ia masih tergolong sebagai kaum yang dihormati yakni bangsawan. Sebagai bangsawan yang dalam darahnya mengalir darah-darah pemimpin, membuat bangsawan termotivasi untuk tetap mempertahankan kehormatannya dengan menganut empat prinsip kebangsawanan leluhurnya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yakni: *lempu, getteng, ada tongeng* dan *temmappasilaing*. Persoalan pembedaan status kebangsawanan dan orang biasa atau sistem hirarki ini terkait erat dengan sistem aturan adat maupun pandangan pandangan yang muncul dari orang-orang sulawesi selatan. Perbedaan status, kekuasaan dan kekayaan sangat jelas kehadirannya dalam masyarakat. adanya pandangan-pandangan khusus mengenai tokoh raja beserta keturunannya.¹¹ Dan karena menyadari ada darah pemimpin dalam dirinya untuk menjadi seorang pemimpin berikutnya atau setidaknya tergabung dalam jajaran pemerintahan di Kabupaten Bone. Baik

sebagai pejabat birokrasi maupun aparatur/pegawai pemerintah.

- c. Alasan selanjutnya adalah keyakinan masyarakat

Bahwa tidak bisa dipungkiri sebagian masyarakat Bone masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya Kabupaten Bone. Bahkan sekarang ini, Bone bukan lagi kerajaan namun masyarakat dengan pemikiran tradisional masih mempercayai aturan-aturan kerajaan. Salah satunya pemilihan pemimpin. Menurut keyakinan masyarakat, pemerintah tertinggi di Kabupaten Bone haruslah dari golongan kaum bangsawan atau keturunan raja-raja terdahulu seperti yang telah ditetapkan To-Manurung. Sehingga bagi masyarakat, selama masih ada kaum bangsawan yang pantas menjadi pemimpin, maka itulah yang menjadi pilihan masyarakat. Walaupun tidak semua masyarakat berpikiran semacam ini, namun dalam kenyataannya dan dari hasil penelitian saya dengan wawancara informan dari kalangan masyarakat, ternyata masih ada yang berpandangan demikian.

Kesimpulan

Hadir dan mendominasinya bangsawan dalam Birokrasi di Kabupaten Bone, serta mampu tercipta eksistensi Bangsawan dalam Birokrasi di Kabupaten Bone ternyata disebabkan oleh strategi Bangsawan itu sendiri. Dan berdasarkan penelitian strategi tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi itu diantaranya sebagai Warisan strategi leluhur, berupa pengangkatan kepala distrik yang merupakan kerabat dari raja bone. Yang terkadang masih dicontoh oleh pejabat birokrasi dalam memilih pejabat birokrasi lainnya namun tetap dengan pertimbangan pemenuhan syarat dan aturan. Strategi selanjutnya yaitu kesadaran kaum bangsawan, yang menyadari dirinya memiliki garis keturunan dari pemimpin yang terhormat dan disegani sehingga termotivasi untuk mengikuti jejak langkahnya. Dengan menganut pula prinsip kebangsawanan leluhurnya untuk dijadikan

¹¹Heddy Shri Ahimsa-Putra, 1988. *Minawang: Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*, Yogyakarta: Gama Press.

pedoman dalam hidupnya sehingga kehormatan dan mampu disegani sebagai kaum bangsawan tetap dimilikinya. Prinsip tersebut secara sederhana terdiri dari 4 unsur, yakni *Lempu (Kejujuran)*, *Getteng (Kekuatan/Kemampuan)*, *Ada Tongeng (Kebenaran dalam berucap)*, *Temmapasilaineng (Tidak membedakan)*. Motivasi tersebut juga menjadikan bangsawan untuk selalu tampil unggul dibandingkan masyarakat yang lainnya dalam segala aspek penilaian kehidupan sehari-hari, seperti Pendidikan, Kekayaan, jabatan, serta Kehormatan Perilaku dalam lingkungan sosialnya. Strategi selanjutnya yaitu keyakinan masyarakat, hadirnya keadilan dan kemakmuran di Bone diawali dengan hadirnya *To Manurung* yang menjadi Bangsawan dan Raja Pertama. Dengan kata lain, Bangsawan merupakan pelopor keadilan dan kemakmuran di Kabupaten Bone sehingga terciptalah kebiasaan dan keyakinan untuk senantiasa mempercayai bangsawan dan menghormati bangsawan di Kabupaten Bone.

Saran

Setelah meneliti di Kabupaten Bone, dapat dipahami bahwa pada awalnya, semua masyarakat sama. Tanpa adanya bangsawan dan non-bangsawan. Namun karena terjadi kekacauan karena tidak ada aturan yang mengikat pada zaman sebelum kerajaan, maka yang kuatlah yang berkuasa dan bebas memperlakukan siapa saja yang dikalahkannya. Lalu datanglah Yang tidak diketahui nama dan asal-usulnya sehingga disebut *To Manurung* (Orang yang langsung turun dari langit, tidak ada ibu dan bapaknya). Masyarakat Bone pun memohon padanya untuk mengatasi kekacauan di Bone.

Maka dengan kebijaksanaan dan kehebatan *To Manurung*, terciptalah kedamaian, keamanan, keadilan, dan kemakmuran di tanah Bone. Berkat jasanya, diangkatlah menjadi raja dan diberi gelar Bangsawan. Karena jasa-jasa beliau,

keluarga hingga keturunannya begitu dicintai dan dihormati pula oleh masyarakat Bone.

Dari cerita singkat tersebut, dapat diketahui bahwa esensi seorang bangsawan adalah kemampuan dalam memberikan kebaikan-kebaikan serta jasa-jasa bagi orang lain. Sehingga mampu menjadi panutan bagi orang lain. Maka dari itu, saran penulis dalam penelitian ini adalah agar kaum Bangsawan seyogyanya tidak melupakan esensi tersebut baik itu pejabat birokrasi maupun yang bukan. Agar keluhuran dan kehormatan Bangsawan Bone tetap terjaga kesakralannya hingga zaman apapun.

Daftar Pustaka

- Ahmad Yani. 2007. *Budaya Politik Orang Bugis Dalam Dinamika Politik Lokal*. Jurnal Masyarakat dan Budaya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Volume 9 No.2
- Abidin, Zainal. 2007. *Analisis Eksistensial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Albrow, M, 2006. *Birokrasi*, Tiara Wacana, Terjemahan, Jakarta
- Bintang Nusu, dkk. 1994. *Perubahan Sosial pada masyarakat bugis Bone di desa Pattiro Bajo dan desa Cinnong Kabupaten Bone*. Bone Dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone
- Edward L. Poelinggomang, 2004. "Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906 – 1942", Yogyakarta : Ombak.

- Fitriani Sari Handayani Razak.2015.*kuasa wacana kebudayaan bugis makassar dalam pilkada di Kabupaten Pinrang*.Jurnal Politik Profetik Volume 5 Nomor 1
- George Balandier (1986). *Antropologi Politik*.
- Hatch, Mary Jo. (2007). *Organization Theory: Modern, Symbolic, & Post Perspective*.Oxford University Press.Burn dan Stalker
- Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat II*, (Yogyakarta: Kanisius, 1980)
- Heddy Shri Ahimsa-Putra, 1988. *Minawang: Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*, Yogyakarta: Gama Press.
- Hasan Walinono. 1979. *Tanete. Suatu Studi Sosiologi Politik*. (Disertasi). Ujungpandang: Universitas Hasanuddin.
- Ilham daeng Makkelo.2017.*Penataan kota dan masyarakat perkotaan Makassar sebagai ibukota negara Indonesia timur (NIT) 1946-1950*.Gadjah Mada Journal of Humanities , Vol.2, No.1
- Koentjaraningrat, *Sejarah teori antropologi I*. UI Press
- Kusdi. 2009. *Budaya Organisasi Teori, Penelitian, dan Praktik*; Jakarta, Salemba Empat
- Louis O.Katsof, *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004
- Mattulada. 1995. *Latoa Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Muzairi. 2002. *Eksistensialisme Jean Paul Sartre*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Prof.Dr.A.Rasyid Asba,MA.dkk.2015.*Silsilah Kekerabatan Raja-Raja*.PT Buku Pintar Indonesia.
- Priyo Budi Santoso,1995. Birokrasi Pemerintahan Orde Baru, Perspektif Kultural dan struktural,GrafindoPersada, Jakarta
- Robbins SP, dan Judge. 2007. *Perilaku Organisasi*, Salemba Empat, Jakarta. (Siagian, 2006: 147)
- Sugiyono. 2010.*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Shri Heddy Ahimsa Putra 2006.“*Nilai-Nilai Budaya Politik Dalam Mitos ToManurung di Sulawesi Selatan*.”(Makalah). (Disampaikan dalam Seminar Nasional di Enrekang, 29 Mei 2006)
- Jurnal**
- Eliza Meiyani. 2010. *Sistem kekerabatan orang bugis di Sulawesi Selatan (suatu analisis antropologi-sosial)*. Jurnal "Al-Qalam" Volume 16 Nomor 26
- Irfan Ridwan Maksum. Kepemimpinan pemerintahan : Kepala Daerah dan DPRD. Jurnal Peningkatan kerja Eksekutif dan implementasi otonomi daerah.
- M. Harun Alrasyid.2007. Reformasi Birokrasi.Jurnal Madani Edisi I
- Mastanning. Mattoana Arajang Di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone (Suatu Tinjauan Kebudayaan Islam). 2015. *Jurnal 130 Rihlah*

Skripsi

Lia Amelia. 2012.*Pilkada Kabupaten Bone dalam konteks sistem kekerabatan dan pelapisan sosial*.Skripsi

Tasrifin Taharan. 2010.*Reproduksi Steorotipe dan Resistensi Orang Katobengke dalam Struktur Masyarakat Buton*.Skripsi

Disertasi

Mattulada.1975. *Latoa, Suatu Lukisan Analitis Antropologi Politik Orang Bugis*.Makassar: Disertasi.